



**Judul** : Singapura-Indonesia : Bahas Lagi Ekstradisi  
**Tanggal** : Rabu, 10 Oktober 2012  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## SINGAPURA-INDONESIA

# Bahas Lagi Ekstradisi

SINGAPURA, KOMPAS — Majelis Permusyawaratan Rakyat mendorong perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura untuk dirundingkan kembali. Perjanjian ekstradisi RI-Singapura yang telah ditandatangani lima tahun lalu tersebut perlu direformulasi terkait pasal/artikel yang menjadi keberatan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

”Defence Cooperation Agreement (DCA) dan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sebenarnya telah ditandatangani lima tahun lalu, tetapi kemudian tidak disetujui atau tidak diratifikasi Komisi I DPR karena keberatan atas beberapa pasal,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari sesuai mendampingi Ketua MPR Taufiq Kiemas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Singapura K Shanmugam di Kantor Kementerian Luar Negeri Singapura, Selasa (9/10).

Wartawan *Kompas* **Elok Dyah Messwati** melaporkan dari Singapura, MPR RI melakukan kunjungan kehormatan memenu-

hi undangan Parlemen Singapura pada 8-9 Oktober 2012. Pada kunjungan dua hari tersebut, rombongan MPR bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean, Ketua Parlemen Republik Singapura Michael Palmer, Shanmugam, dan Presiden Republik Singapura Tony Tan Keng Yam.

Menurut Hajriyanto, keberatan DPR untuk meratifikasi disebabkan masih ada yang mengganjal terkait DCA soal latihan perang di wilayah Indonesia, yakni Singapura bisa mengundang pihak ketiga.

Taufiq Kiemas pada pertemuan dengan Menlu Singapura tersebut mengatakan bahwa sekarang situasi sudah membaik dan tidak ada masalah, jadi sebaiknya dibicarakan kembali soal ekstradisi tersebut.

”Menlu Singapura senyum-senyum saja saat bicara soal ekstradisi tersebut dan mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia dan Singapura bukannya tidak punya perjanjian ekstradisi itu. Kita sudah menandatangani lima tahun lalu,” ujarnya.